BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia tentunya ingin agar masyarakatnya memiliki kehidupan yang mumpuni, sejahtera, adil dan makmur. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut, salah satunya yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini tentunya akan memerlukan biaya yang sangat besar. Pembiayaan pembangunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri Indonesia.

Sebagai pelaku sektor publik, kebijakan yang berkenaan dengan keuangan tentunya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Perangkat utama dari kebijakan fiskal pemerintah dalam bidang penerimaan adalah perpajakan. Menurut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Sumantry, 2011), wajar jika pemerintah menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Hal ini dikarenakan penerimaan yang bersumber dari

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

sektor pajak aman bagi negara karena tidak terlalu dipengaruhi oleh gejolak pasar dunia, dapat diprediksi sebelumnya, baik menyangkut jumlah penerimaannya maupun pengeluarannya, dan masih dapat dikembangkan baik subjek maupun objek pajaknya.

Dengan semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat dan perekonomian masyarakat, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu pajak yang memiliki potensi paling tinggi. Dalam Undang-Undng Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis dari pajak provisi. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, pajak kendaraan bermotor dinyatakan sebagai pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam penentuan penerapan pajak. Dimana nantinya penerapan pajak dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diimbangi dengan tarif yang tidak terlalu membebani masyarakat.

Menurut Pejabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek, sekitar 80% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat serta diiringi dengan kebutuhan terhadap alat transportasi yang kian tinggi, tentunya akan berimbas terhadap jumlah kendaraan bermotor dari hari ke hari. Semakin meningktanya jumlah kendaraan bermotor, tentu akan berimbas terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini didorong

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

lagi dengan mudahnya akses untuk membeli kendaraan bermotor, salah satunya yaitu tawaran terkait cicilan dengan bunga yang sangat rendah. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan drastis jumlah kendaraan bermotor, tidak terkecuali di kota Bukittinggi.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tentunya didasari oleh berbagai indikator diantaranya yaitu munculnya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melaksanakan kewajibannya, adanya sanksi yang diterapkan terkait pajak, kualitas pelayanan pajak kepada publik, pengetahuan masyarakat terkait pajak, dan sosialisasi dalam perpajakan.

Kesadaran dan kepedulian suka rela wajib pajak tentunya sangat dibutuhkan agar pembayaran pajak terus meningkat (Susanto, 2012). Faktor ini tentunya juga akan berdampak terhadap tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Asli Daerah tersebut tentunya akan digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana umum daerah. Namun jika dilihat, masih banyak masyarakat yang tidak pstuh terhadap aturan dalam membayar pajak, baik itu disengaja maupun tidak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.

Wajib pajak biasanya akan lebih taat dalam membayar pajak jika disamping kewajiban tersebut diiringi oleh sanksi yang tegas. Menurut (Tjahjono, 2005), sanksi pajak dinyatakan sebagaisuatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatui. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jadi, sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi para pelanggar peraturan perpajakan agar tidak meremehkan dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011).

Agar pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah daerah bekerjasama dengan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memberikan pelayanan yang baik terkait dengan seluruh informasi yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seberapa pentingnya pajak tersebut. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan ole pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara (Palda dan Hanousek, 2002).

Menurut (Suryadi, 2006), meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu ada yang memperolehnya dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih 2011).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sementara itu, sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi terkait pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai seberpa pentingnya membayar pajak jika sosialisasi tersebut dilakukan dengan baik, benar, jelas dan ramah oleh petugas pajak, yang nantinya akan berpengaruh terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Menurut (Anwar, 2015), sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penngetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatul Ummah (2014) mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menemukan bahwa hanya variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan publik ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Sementara itu Anis Isnaini Nur Isyatir dan Wafroturrohmah (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi”.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah terutama SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan publik, pengetahuan pepajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui apakah kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah terutama SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan publik, pengetahuan pepajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk memberikan saran maupun masukan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus pembangunan daerah, sehingga masyakarat memahami manfaat pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami dan memperluas pengetahuan terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.5 Sitematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sisstematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori-teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Bab ini juga menampilkan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, batasan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil analisa data dan saran yang dianggap perlu untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA